

**PENDAMPINGAN HUKUM DAN PEMULIHAN PENGUATAN ADMINISTRASI
PUBLIK PASCA BENCANA BANJIR DI DESA TUALANG BARO: MODEL
TRANSFORMASI KETAHANAN YURIDIS BERBASIS AKADEMIK**

M. Irfan Islami Rambe¹, Dhea Putri Ramadhani¹, Raya¹, Hendra Ramadhan¹

¹Hukum, Universitas Samudra
*email: *irfanislami@unsam.ac.id*

Abstract: The flood disaster that hit Tualang Baro Village caused massive damage to public administration infrastructure, including loss of vital documents, disruption of population administration services, and legal uncertainty in land tenure. This community service activity aims to provide legal assistance and strengthening of public administration recovery for flood-affected communities through an academic-based legal resilience transformation model. Activities included legal counseling sessions, direct document recovery assistance at the village office, and capacity building training for village officials. The program successfully facilitated the recovery of civil registration documents, strengthened community legal awareness, and produced a replicable Academic-Based Juridical Resilience Transformation Model (MTKYA). This activity simultaneously supported the achievement of Higher Education Key Performance Indicators (IKU) and demonstrated the concrete role of universities in post-disaster legal recovery and community empowerment.

Keywords: Legal Assistance; Public Administration; Post-Flood Disaster; Tualang Baro; MBKM.

Abstrak: Bencana banjir yang melanda Desa Tualang Baro menyebabkan kerusakan masif pada infrastruktur administrasi publik, termasuk kehilangan dokumen vital, gangguan layanan administrasi kependudukan, dan ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan hukum dan penguatan pemulihan administrasi publik bagi masyarakat terdampak banjir melalui model transformasi ketahanan yuridis berbasis akademik. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan hukum interaktif, pendampingan pemulihan dokumen kependudukan secara langsung di kantor desa, serta pelatihan penguatan kapasitas aparatur desa. Program ini berhasil memfasilitasi pemulihan dokumen kependudukan warga, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menghasilkan Model Transformasi Ketahanan Yuridis Berbasis Akademik (MTKYA) yang dapat direplikasi. Kegiatan ini sekaligus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan membuktikan peran nyata kampus dalam pemulihan hukum dan pemberdayaan masyarakat pascabencana.

Kata kunci: Pendampingan Hukum; Administrasi Publik; Pascabencana Banjir; Tualang Baro; MBKM.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana alam yang tinggi, termasuk bencana banjir yang secara berkala melanda berbagai wilayah, khususnya kawasan Aceh. Pada awal tahun 2026, banjir besar melanda Desa Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, menghancurkan

infrastruktur fisik permukiman sekaligus melumpuhkan sistem administrasi publik desa. Ratusan kepala keluarga kehilangan dokumen kependudukan vital, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta nikah, yang merupakan prasyarat utama untuk mengakses berbagai layanan negara dan kepastian hukum. (Astuti, 2026).

Kajian literatur menunjukkan bahwa krisis administrasi pascabencana merupakan persoalan sistemik yang kerap luput dari perhatian dalam fase tanggap darurat. Kusumasari (2014) menegaskan bahwa ketiadaan dokumen kependudukan pasca bencana tidak hanya menghambat akses layanan publik, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang berkepanjangan. Prasetyo dan Handayani (2020) membuktikan bahwa keterlibatan perguruan tinggi melalui program pendampingan hukum terstruktur mampu mempercepat proses pemulihan yuridis masyarakat terdampak secara signifikan. Namun demikian, model semacam ini belum pernah diterapkan secara sistematis di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. (Wahyudi & IP, 2026).

Kebaruan ilmiah dari kegiatan PKM ini terletak pada pengembangan Model Transformasi Ketahanan Yuridis Berbasis Akademik (MTKYA), yakni sebuah pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pendampingan hukum individual, pendidikan hukum komunal, dan penguatan kelembagaan desa, dengan menempatkan mahasiswa sebagai agen perubahan aktif dalam kerangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pendekatan ini membedakannya dari model bantuan hukum konvensional yang selama ini bersifat pasif dan tidak sistematis. (Yanuarsari et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan PKM ini dirancang untuk menjawab permasalahan: bagaimana model pendampingan hukum berbasis akademik yang melibatkan mahasiswa dapat memulihkan administrasi publik dan memperkuat ketahanan yuridis masyarakat Desa Tualang Baro pascabencana banjir? Adapun tujuan kegiatan ini adalah: (1) menyelenggarakan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum warga terdampak; (2) mendampingi warga dalam proses pemulihan dokumen administrasi kependudukan yang hilang atau rusak; (3) memperkuat kapasitas aparatur Desa

Tualang Baro dalam tata kelola administrasi berbasis hukum; serta (4) menghasilkan model ketahanan yuridis yang dapat direplikasi di wilayah terdampak bencana lainnya.

METODE

Kegiatan PKM Tanggap Bencana Banjir ini dilaksanakan pada bulan Februari 2026, bertempat di Kantor Desa Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Tim pelaksana terdiri dosen anggota Fakultas Hukum Universitas Samudra, serta mahasiswa aktif Program Studi S1 Hukum yang dilibatkan sebagai relawan hukum (paralegal). Pelibatan mahasiswa ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan MBKM sekaligus wujud dukungan nyata terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas empat tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah identifikasi dan asesmen kebutuhan hukum masyarakat, yang dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah dan wawancara terstruktur kepada kepala keluarga terdampak. Pada tahap ini, tim memetakan jenis dan volume permasalahan hukum yang dihadapi, mulai dari kehilangan dokumen kependudukan, kerusakan surat-surat tanah, hingga persoalan kepastian hukum atas penguasaan lahan pascabanjir.



Gambar 1. Lokasi Penyelenggaraan Penyuluhan

Tahap kedua adalah penyelenggaraan penyuluhan dan

pendidikan hukum dalam format lokakarya interaktif di kantor desa. Materi penyuluhan mencakup hak-hak hukum warga sebagai korban bencana, prosedur resmi pengurusan penggantian dokumen kependudukan, mekanisme pengaduan atas ketidakberesan layanan publik, serta pemahaman dasar mitigasi bencana dari perspektif hukum. Mahasiswa berperan aktif sebagai fasilitator diskusi kelompok kecil, sehingga tercipta suasana yang lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh seluruh peserta. (Yarni et al., 2024). Tahap ketiga adalah pendampingan langsung dalam proses pemulihan dokumen kependudukan. Tim mendampingi warga mengurus penggantian dokumen ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Pertanahan BPN, dan instansi terkait lainnya. Mahasiswa membantu pengisian formulir, kelengkapan berkas administrasi, dan komunikasi dengan petugas instansi, sehingga proses yang biasanya memakan waktu panjang dapat dipercepat secara signifikan. (Alkhani & Suratha, 2025).



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan PKM

Tahap keempat adalah pelatihan penguatan kapasitas aparatur Desa Tualang Baro. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kompetensi perangkat desa dalam tata kelola administrasi kependudukan berbasis hukum, agar aparatur desa mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada warganya, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi pascabencana. Seluruh rangkaian kegiatan dievaluasi melalui observasi langsung, dokumentasi kegiatan, dan

wawancara akhir bersama peserta dan aparatur desa. (Sepang et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Samudra di Desa Tualang Baro berjalan dengan lancar dan mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari masyarakat setempat. Kantor Desa Tualang Baro menjadi pusat kegiatan selama berlangsungnya program, dengan kehadiran warga yang konsisten dari hari ke hari. Datok Pangulu Desa Tualang Baro, Bapak Alfat, secara terbuka menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kehadiran tim PKM. Beliau menyatakan bahwa kegiatan ini sangat membantu dalam pemulihan desa yang sempat lumpuh akibat bencana banjir.

Pada tahap penyuluhan hukum, kegiatan lokakarya interaktif diikuti oleh warga dengan partisipasi yang tinggi. Para peserta yang semula tidak mengetahui prosedur pengurusan dokumen kependudukan dan hak-hak hukum mereka sebagai korban bencana, secara bertahap memperoleh pemahaman yang memadai melalui sesi diskusi yang dipimpin oleh dosen dan difasilitasi oleh mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa terbukti menciptakan komunikasi yang lebih cair dan efektif, mengingat kedekatan usia dan cara penyampaian yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Peserta tampak aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mengenai kendala-kendala yang mereka hadapi dalam mengurus administrasi pascabanjir.

Pada tahap pendampingan pemulihan dokumen, tim berhasil mengoordinasikan proses pengurusan penggantian berbagai jenis dokumen kependudukan secara langsung. Mahasiswa yang bertugas sebagai paralegal memainkan peran krusial dalam membantu warga mempersiapkan berkas, mengisi formulir, dan berkomunikasi

dengan petugas di Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Tamiang maupun di Kantor Pertanahan BPN. Proses yang selama ini dianggap rumit dan memerlukan waktu panjang oleh masyarakat dapat disederhanakan berkat pendampingan intensif dari tim. Pengurusan dokumen yang paling kompleks adalah surat keterangan dan sertifikat tanah, yang memerlukan verifikasi lapangan dan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait.



Gambar 3. Pelatihan Administrasi Berbasis Hukum

Pada tahap pelatihan kapasitas aparatur desa, seluruh perangkat Desa Tualang Baro mengikuti sesi pelatihan administrasi berbasis hukum yang diselenggarakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra. Materi pelatihan difokuskan pada tata cara pencatatan administrasi kependudukan, pengelolaan arsip desa, dan prosedur pelayanan administrasi dalam situasi darurat pascabencana. Perangkat desa menyambut positif pelatihan ini dan menyatakan kesiapan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelayanan sehari-hari kepada warga. (Purba, 2021).

Kegiatan PKM ini menegaskan bahwa Tindakan yang dilakukan merupakan bentuk konkret implementasi kebijakan MBKM sekaligus dukungan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan wujud nyata peran kampus dalam memberikan pendidikan hukum dan mitigasi pascabencana kepada Masyarakat (Herianto et al., 2024). Bagi mahasiswa

peserta, kegiatan ini memberikan pengalaman lapangan yang tidak ternilai, yakni kemampuan mengimplementasikan ilmu hukum secara langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan, jauh melampaui apa yang dapat dipelajari di ruang kelas. (Bramantyo, 2018).

Secara keseluruhan, model MTKYA yang diterapkan dalam kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan terpadu yang menggabungkan penyuluhan hukum, pendampingan dokumen, dan penguatan institusional desa secara simultan mampu menciptakan dampak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan dengan model bantuan hukum konvensional (Riyanto, 2025). Keunikan model ini terletak pada melibatkan aktif mahasiswa sebagai agen perubahan yang menjembatani antara kebutuhan hukum masyarakat dan kapasitas birokrasi pemerintah, sejalan dengan semangat program MBKM yang mendorong mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat. (Rahmah & Putra, 2024).

SIMPULAN

Kegiatan PKM Tanggap Bencana Banjir yang dilaksanakan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Samudra di Desa Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak banjir. Melalui serangkaian kegiatan penyuluhan hukum, pendampingan pemulihan dokumen, dan pelatihan aparatur desa, program ini berhasil membantu warga memulihkan kepastian hukumnya, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam tata kelola administrasi berbasis hukum.

Model Transformasi Ketahanan Yuridis Berbasis Akademik (MTKYA) yang lahir dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perguruan tinggi lain dalam merancang program pendampingan

hukum pascabencana yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Ke depan, program PKM ini diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin dan diperluas jangkauannya, guna menciptakan tertib administrasi publik dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari upaya tanggap bencana jangka panjang di wilayah Aceh Tamiang dan sekitarnya.

Saran yang dapat disampaikan dari kegiatan ini adalah perlunya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengintegrasikan komponen pendampingan hukum secara eksplisit dalam dokumen rencana kontijensi bencana daerah. Selain itu, penting untuk membangun klinik hukum permanen berbasis desa melalui kerjasama jangka panjang antara pemerintah daerah dengan Fakultas Hukum Universitas Samudra, agar masyarakat dapat mengakses layanan hukum secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat terjadi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhani, F. V., & Suratha, I. G. (2025). *Efektivitas Petugas Registrasi Gampong Dalam Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh*. IPDN.
- Astuti, D. (2026). *Bencana Alam di Era Reformasi dan Respons Negara*. Meraki Pustaka.
- Bramantyo, R. Y. (2018). Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik (Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0). *Transparansi Hukum*, 1(2).
- Herianto, E., Rispawati, R., Istiningsih, S., & Asrin, A. (2024). Upaya Meningkatkan Capaian Iku Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Sk-Mbkm Mandiri. *Jurnal Interaktif: Warta Pengabdian Pendidikan*, 4(1), 60–70.
- Purba, F. K. (2021). *Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Di Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau.
- Rahmah, S., & Putra, B. S. A. (2024). Peluang dan Tantangan Bantuan Hukum di Daerah Pedesaan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 64–71.
- Riyanto, W. H. (2025). *Model Kelembagaan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan*. UMMPress.
- Sepang, J., AB, Y. A. S., & Thalib, T. (2025). KEMAMPUAN APARAT DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI DESA HUNTU BARAT KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(4), 1056–1079.
- Wahyudi, H., & IP, S. (2026). *Birokrasi Dan Kebijakan Publik Dalam Mitigasi Bencana*. Kreasi Cendekia Pustaka.
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2022). Peran program merdeka belajar kampus merdeka dalam meningkatkan kemandirian desa. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 5(2), 52–62.
- Yarni, M., Dhyta, N. B., & Ramadhona, A. (2024). Penyuluhan Hukum Urgensi Digitalisasi di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Legal Outreach on the Urgency of Digitalization in Delima Village, Tebing Tinggi District, Tanjung Jabung Barat Regency). *Journal Of Rural Community Development*, 1(2), 33–47.